

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENGAWASI
PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(Studi Kasus di Sekolah Dasar di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

**Delfika
137310131**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

Persembahan

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Serta terimakasih juga tidak luput juga disampaikan sebesar-besarnya kepada lembaga Universitas Islam Riau dan kedua dosen pembimbing Bapak **Drs,H. Zaini Ali, M.Si** dan Bapak **Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si** yang senantiasa mengarahkan dan mengoreksi setiap kesalahan sehingga layak untuk diujikan sebagai syarat akhir proses pendidikan, meski saya sadar apa yang saya dapatkan hari ini tidak sebanding dengan apa yang kedua orang tuaku korbankan, keikhlasanmu mengorbankan segala perasaan, bekerja tanpa kenal lelah, sehingga fisik mulai melemah semua engkau kerjakan dengan ikhlas tanpa pernah menyerah, maafkan anakmu ayah dan inu yang selalu menyusahkanmu.

“Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku”

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada mereka yang sering bertanya :

“ kapan sidang?”

“kapan wisuda?”

“kapan nyusul?”

Kalian adalah salah satu motifasi saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. dan tidak lupa juga untuk adik (Benny Hendry) saya yang cerewat nasehatin kakak nya untuk segera meyelesaikan tugas akhirnya supaya bisa segera hidup mandiri dan tidak menyusahkan orang tua (lagi)_-

“DAN SECARA KHUSUS SAYA PERSEMBAHKAN JUGA UNTUK PENDAMPING HIDUP SAYA (KELAK)”

Akhirnya ayah ibu anakmu berhasil anakmu membuktikan motivasi itu, Alla trimakasih engkau telah menempatkan diri ini ditengah dua malaikat yang senantiasa ikhlas membesarkanku, menjagaku, membimbingku, ya allah berikanlah balasan yang setimpal atas apa yang telah mereka korbakan untukku, ya allah beri mereka umur yang panjang agar aku bias membalas jasa kedua orang tuaku, Amin Ya Robbal Alamin.

Untuk mu ayah (Alfihendri) dan ibu (Indra)

Terimakasih “ akak sayangkan apak dan ibu sampai bile-bile”

Ttd anakmu : Delfika,S.IP

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Delfika
NPM : 137310131
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif Skripsi beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan mengacu kepada kaidah-kaidah Metode Penelitian Ilmiah dan Penulisan Karya Ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2021
Yang membuat pernyataan

Delfika

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul, **“Peranan Dinas Dalam Mengawasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai)”** dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman ilmu dan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal ini penulis berharap kamakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi mau pun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau bersama Dekan Fisipol yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin

2. Bapak Dr. Ranggi, M.Si .Selaku Ketua Jurusan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Drs.H. Zaini Ali, M.Si dan Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si Selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
4. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan usulan penelitian ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian usulan penelitian ini.
5. Bapak Lurah beserta pegawai di Kelurahan kampung Melayu yang memberikan izin dan pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
7. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

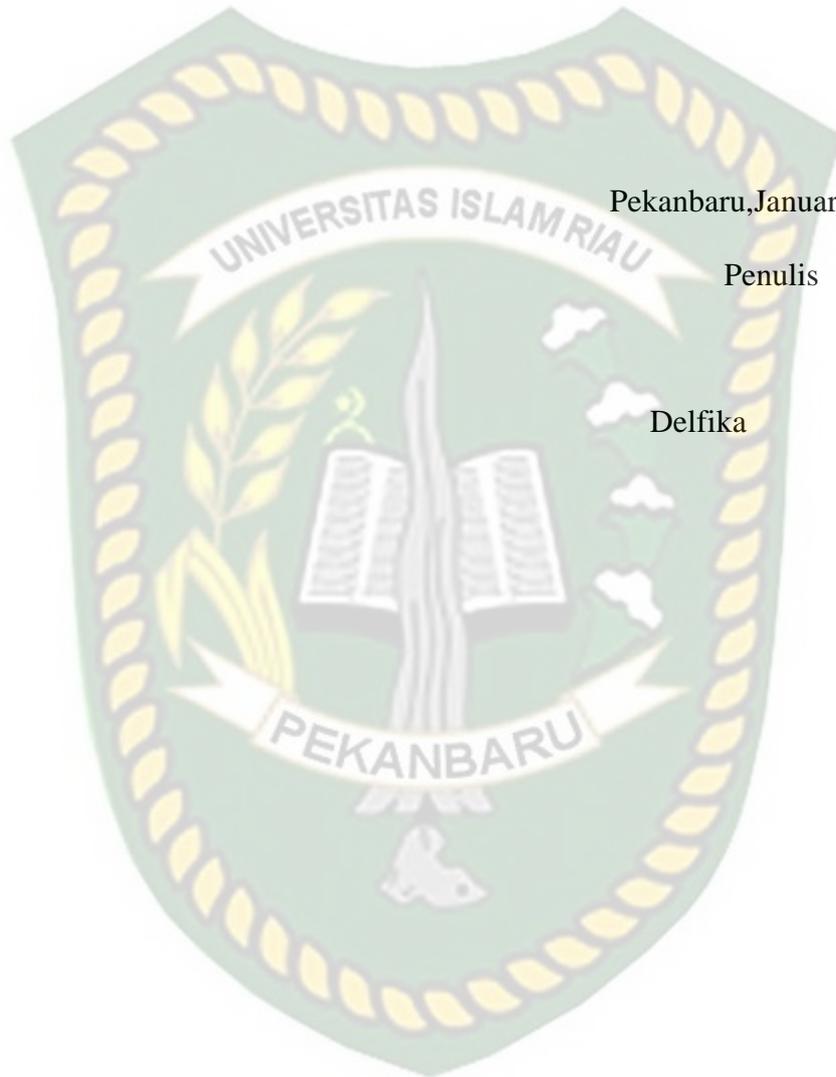
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya usulan penelitian ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan RahmatNya kepas kita semua . Amin.

Pekanbaru, Januari 2021

Penulis

Delfika



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBARAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	13
a. tujuan Penelitian.....	13
b. kegunaan penelitian.....	14
BAB II STUDI PERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Pemerintahan.....	15
2. Konsep Peranan.....	20
3. Konsep Kebijakan	25
4. Konsep Pengawasan.....	28
5. Konsep Pendidikan.....	41
6. Program Dana Bantuan Operasional Sekolah	43
B. Penelitian terdahulu.....	43
C. Kerangka pikir.....	45
D. Konsep Operasional	46
E. Operasional Variabel.....	47
F. Teknik Pengukuran	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Populasi Dan Sampel	52
D. Teknik Penarikan Sampel	52
E. Jenis Dan Sumber Data	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53

G. Teknik Analisis Data.....	54
H. Jadwal Waktu Kegiatan.....	54
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai	56
B. Gambaran Umum Mengenai Pendidikan Di Kota Dumai	59

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	64
B. Hambatan-Hambatan Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Mengawasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 021 Dan 022 Kota Dumai	86

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	89
----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
I.1 : Jumlah Sekolah Dasar Di Kecamatan Dumai Timur.....	11
II.1 : Penelitian Tedahulu.....	43
II.2 : Operasional Variabel Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Dumai Timur	47
III.1 : Operasional Variabel.....	52
III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Mengawasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai	55
IV.1 : Jumlah Sekolah Dasar Di Kecamatan Dumai Timur.....	59
V.1 : Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur.....	64
V.2 : Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Kelamin	65
V.3 : Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	66
V.4 : Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengamatan Di Lapangan	70
V.5 : Hasil Observasi Terkait Pengamatan dilapangan.....	73
V.6 : Tanggapan Responden Terhadap Indicator Inspeksi Langsung	76
V.7 : Hasil Observasi Terkait Inspeksi Langsung	77
V.8 : Tanggapan Responden Terhadap Indicator Pelaporan.....	79
V.9 : Hasil Observasi Terkait Pelaporan.....	80

V.10 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Implementasi Peran
Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Mengawasi Penggunaan Dana
Bos Di Sdn 021 Dan 022 Kota Dumai85



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1	kerangka Pikiran Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Kecamatan Dumai Timur45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Salinan Dokumen Pendukung Keabsahan Penelitian	90
2. Dokumentasi Foto Penelitian	91
3. Angket Penelitian	97
4. Daftar Data Responden	98
5. Daftar Pertanyaan.....	99
6. Setrifikat diRektorat Dakwah Islam Kampus	
7. Surat Keterangan Jurnal Online Mahasiswa	
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi	
9. Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir Tentang Penetapan Desan Pembimbing Penulis Skripsi	
10. Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi	
11. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi	
12. Riwayat penulis	

ABSTRACT

THE ROLE OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT IN MENGAWASI USE OF OPERATIONAL SCHOOL HELP RISK (Case Study at Elementary School in Dumai Timur Dumai Sub-District)

By:
Delfika
NPM: 137310131

The government's policy to channel School Operational Assistance (BOS) funds is one form of government effort in order to realize the nation's intelligence goals. In general, the school's operational assistance program aims to alleviate the burden of society on education financing in the framework of 9 years of qualified compulsory education. The purpose of this research is to know and explain the role of Education Office in Overseeing School Fund Operational Fund (BOS) Fund at Primary School (SD) in Dumai Timur Dumai Subdistrict and to know the factors that obstruct School Fund Operational Assistance (BOS) by the Department of Education at Elementary School (SD) in Dumai Timur Dumai District. The research method used is a quantitative method where data collection by using the questionnaire and as well as describing each data from the results of respondents' answers. Sampling technique is purposive sampling technique that is the respondent used as the source of information is taken based on the activities undertaken in the research location. Based on the recapitulation table, it can be seen that the overall role of Dumai City Education Office is good enough to supervise the use of BOS funds at SDN 021 and 022 Dumai. It can be seen that 46.67% of respondents stated that overall the role indicator of Education Office of Dumai City is good enough to supervise the use of BOS funds at SDN 021 and 022 Dumai.

Keywords: BOS Funds, Roles, Primary Schools

ABSTRAK

PERANAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENGAWASI PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi Kasus di Sekolah Dasar di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai)

Oleh :Delfika
NPM: 137310131

Program bantuan operasional sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Dinas Pendidikan dalam Mengawasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Dinas Pendidikan Pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa angket dan wawancara, yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kecamatan Dumai Timur. Dinas Pendidikan Kota Dumai sudah cukup baik dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah SDN 021 dan 022 Kota Dumai. Hasil menunjukkan bahwa 46,67% responden menyatakan bahwa secara keseluruhan indikator peranan Dinas Pendidikan Kota Dumai sudah cukup baik dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah SDN 021 dan 022 Kota Dumai. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengawasan dana BOS di sekolah-sekolah khususnya kota Dumai yaitu Faktor sumber daya manusia, jumlah tim pengawas lapangan tidak sebanding dengan jumlah sekolah SD yang ada di Kota Dumai. serta Faktor pemberian sanksi, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan tertulis. Dalam contoh kasus tertentu Dinas Pendidikan belum bisa mengatasi masalah pelanggaran dengan baik, karena masih merasa bahwa pelanggaran yang terjadi tidak bisa dihindari.

Kata Kunci: Dana BOS, Peranan, Sekolah Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk republik dengan sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alenia IV yang meliputi : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut, maka disusun pemerintahan secara bertingkat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintahan desa.

Untuk memudahkan pemerintahan di Negara Republik Indonesia, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 yaitu wilayah Republik Indonesia dibagi atas wilayah provinsi dan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Dalam menyelenggarakan pemerintah yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah digunakan asas otonomi dan tugas pembantu.

1. Desentralisasi, adalah penyelenggaraan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI;
2. Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
3. Tugas Pembantu, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Ndraha, 2003;12).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi sehingga menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bergesernya status dan kedudukan suatu kelembagaan dalam formasi sistem pemerintahan daerah. Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah pada batasan kekuasaan dan wewenang suatu kelembagaan dalam mengimplementasikan proses-proses regulasi, legislasi, dan kebijakan publik. Konsekuensi tersebut tampak pada pergeseran fungsi dan peran organisasi pemerintahan dalam melakukan fungsi manajerial seperti koordinasi, bantuan, fasilitasi, pengaturan, evaluasi serta pengawasan atas suatu kebijakan. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang berorientasi pada desentralisasi sebagai konsekuensi penyelenggaraan otonomi daerah, maka sudah selayaknya pemerintah daerah lebih dapat menjalankan fungsi pokok pemerintah yakni fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan secara cepat dan tepat terhadap daerahnya.

Misi yang terkandung adalah semangat demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat serta pemerataan dan keadilan. Implementasi otonomi daerah

membawa konsekuensi pada dinamika sosial politik dan tidak berjalan sesuai dengan tuntutan dan harapan dari rakyat dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab.

Kabupaten/Kota merupakan daerah otonomi yang memiliki kewenangan mencakup seluruh bentuk kewenangan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu. Kewenangan wajib bidang pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Dalam menyelenggarakan pemerintah, klasifikasi urusan pemerintahan dibagi seperti yang tertulis pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan Pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (Ndraha, 2003;13).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut daerah yang bersangkutan diberi kekuasaan untuk membuat peraturan daerah atau peraturan lain yang sifatnya untuk kelangsungan pemerintahan di daerah. Tujuannya tidak

lain adalah untuk kelancaran pembangunan daerah itu sendiri. Sebagaimana tercantum didalam undang-undang dasar 1945 didalam pasal 18 ayat (5) dan (6) yang berbunyi;

Adapun urusan yang diserahkan pada daerah sebagai urusan wajib adalah; Dalam pasal 14 ayat (1) dikatakan Urusan wajib menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/Kota meliputi;

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana, dan prasarana umum.
- e. Penanganan bidang kesehatan.
- f. Penyelenggaraan pendidikan.
- g. Penanggulangan masalah sosial.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan pertahanan.
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal. Dan
- o. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu daerah otonom yang diberi kewenangan otonomi daerah adalah kota Dumai. Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia, setelah Kota Palangka Raya dan Kota Tidore Kepulauan. Kota ini berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif (kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya,

Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km². salah satu urusan yang dijalankan oleh pemerintah kota Dumai adalah urusan pendidikan.

Sehubungan dengan ini, Pemerintah Daerah kota Dumai telah memberikan kewenangan pada Dinas Pendidikan berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Dalam Pasal 4 dari Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah disebutkan bahwa tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan adalah :

Dinas Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- c. membina dan melaksanakan urusan dibidang pendidikan;
- d. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;

- e. membina unit pelaksanaan teknis di lingkup tugasnya;
- f. menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas pendidikan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, maka Dinas

Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumuskan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- c. penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
- d. pembinaan dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas Pendidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan tersebut maka berdasarkan Perda nomor 14 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah telah ditetapkan uraian tugas dari organisasi Dinas Pendidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Sekretaris, Membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum Dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pengembangan Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar, Membawahi:
 - 1. Seksi Taman Kanak-Kanak;
 - 2. Seksi Sekolah Dasar;
 - 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar.
- d. Bidang Pengembangan Sekolah Menengah, Membawahi:
 - 1. Seksi Sekolah Menengah Pertama (Smp);
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Atas (Sma)/ Sekolah Menengah Kejuruan (Smk);
 - 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Smp/Sma/Smk.
- e. Bidang Pengembangan Luar Sekolah, Membawahi:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (Paud);
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
- f. Badan Pengembangan Kesiswaan, Membawahi:

1. Seksi Kesenian;
 2. Seksi Penjaskes Sekolah;
 3. Seksi Kreatifitas Siswa.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd);
1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Salah satu sub bagian dari Dinas Pendidikan adalah Sub Bagian Keuangan yang tugasnya sebagai berikut:

1. Menyusun dan mendata penggunaan anggaran setiap tahunnya pada setiap bagian dan seksi serta sekolah
2. Melakukan penyusunan Daftar Isian Proyek yang telah disusu bersama Kepala Dinas
3. Menerima pelaporan penggunaan anggaran yang telah di salurkan bagi setiap sekolah pada kepala dinas
4. **Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dari penyaluran anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada setiap sekolah**

Kebijakan pemerintah untuk menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Program Kompesasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah demi untuk mewujudkan tujuan kecerdasan bangsa. (Tangkilisan,2003;6)

Pada tahun 2012 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mulai tahun anggaran 2012 dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi.

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian

dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Secara umum program bantuan operasional sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program bantuan operasional sekolah bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Sekolah Menengah Pertama Terbuka (Terbuka) Negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Kota Dumai. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program bantuan operasional sekolah. Tahun anggaran 2020, dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2020, yaitu semester 2 (dua) tahun pelajaran 2019/2020 dan semester 1 (satu) tahun pelajaran 2019/2020.

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3(tiga) bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Khusus untuk sekolah di daerah terpencil, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan 6(enam) bulanan. Penetapan daerah terpencil dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan secara khusus, atas usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencakup :

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan.
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan)
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, Pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan (PAKEM), pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba)
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa)
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan

- jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset
7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah dasar diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi bantuan oprasional sekolah
 9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, musyawarah guru mata pelajaran dan musyawarah kerja kelompok kepala sekolah. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan musyawarah kerja kelompok kepala sekolah atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana bantuan oprasional sekolah untuk peruntukan yang sama
 10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin . Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)
 11. Pembiayaan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti alat tulis kantor (ATK) termasuk tinta printer, CD dan flash disk, penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Bank/PT Pos
 12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran
 13. Bila seluruh komponen 1 sampai dengan 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan mebeler sekolah.

Di kota Dumai terdapat sebanyak 115 buah Sekolah Dasar, sedangkan di Kecamatan Dumai Timur terdapat 20 Sekolah Dasar, dari pengamatan awal di beberapa Sekolah Dasar di Kecamatan Dumai Timur terindikasi sejumlah permasalahan mengenai penggunaan Dana Bos.

Tabel 1.1. Jumlah sekolah Dasar di Kecamatan Dumai Timur

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Kelurahan	Jumlah Siswa
1	SD NEGERI 017 BULUH KASAP	Jl. Sultan Syarif Kasim	BULUH KASAP	224
2	SD NEGERI 015 BULUH KASAP	Jl. Hang Tuah	BULUH KASAP	505
3	SD NEGERI 005 TELUK BINJAI	Jl. Sultan Syarif Kasim	TELUK BINJAI	427
4	SD NEGERI 021 TANJUNG PALAS	Jl. Budi, Rejosari	TANJUNG PALAS	452
5	SD NEGERI 014 BULUH KASAP	Jl. Sultan Syarif Kasim	BULUH KASAP	304
6	SD NEGERI 025 TELUK BINJAI	JALAN KESEHATAN	TELUK BINJAI	306
7	SD NEGERI BINAAN KHUSUS KOTA DUMAI	Jl. Sultan Syarif Kasim	TELUK BINJAI	271
8	SD NEGERI 007 TELUK BINJAI	Jl. Jendral Sudirman Gg. Srilanggam	TELUK BINJAI	340
9	SD NEGERI 023 TELUK BINJAI	Jl.Jend Sudirman Gg. Srilanggam	TELUK BINJAI	157
10	SD NEGERI 004 TELUK BINJAI	Jl. Sultan Syarif Kasim	TELUK BINJAI	492
11	SD NEGERI 024 TELUK BINJAI	Jl. Jend. Sudirman, Gg. Srilanggam	TELUK BINJAI	200
12	SD NEGERI 020 JAYA MUKTI	Jl Kesuma Gg.Flamboyan	JAYA MUKTI	371
13	SD NEGERI 028 SRI PULAU	Rt 12 Sri Pulau	TANJUNG PALAS	63
14	SD NEGERI 027 BUKIT BATREM	Jln Swadaya Bukit Batrem	BUKIT BATRM	630
15	SD NEGERI 016 BULUH KASAP	Jl. Sultan Syarif Kasim	BULUH KASAP	317
16	SD NEGERI 022 JAYAMUKTI	Jl. Teladan	JAYAMUKTI	545
17	SD NEGERI 006 TELUK BINJAI	Jl. Jend Sudirman Gg Srilanggam	TELUK BINJAI	300
18	SD NEGERI 010 JAYAMUKTI	Jl. Kaharudin Nasution	JAYA MUKTI	319
19	SD NEGERI 013 BULUH KASAP	Jl. Sultan Syarif Kasim	BULUH KASAP	345
20	SD NEGERI 009 TANJUNG PALAS	Tanjung Palas	TANJUNG PALAS	303

Sumber:Referensi data kemdikbud, 2019

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Sekolah Dasar Negeri 022 JAYAMUKTI dan di Sekolah Dasar Negeri 021 TANJUNG PALAS. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di kedua Sekolah Dasar tersebut karena dari hasil observasi, fungsi pengawasan Dinas pendidikan Kota Dumai belum dilaksanakan secara maksimal di Sekolah Dasar Negeri 022 JAYAMUKTI dan di Sekolah Dasar Negeri 021 TANJUNG PALAS, hal ini dilihat dari masih bermasalahnya penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah tersebut, karena meskipun sudah ada dana BOS namun orangtua masih mengeluhkan adanya pungutan-pungutan lainnya disekolah.

Berdasarkan pengamatan dilapangan yang dilakukan, di Sekolah Dasar yang ada di Kota Dumai masih terdapatnya berbagai fenomena permasalahan dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah, diantaranya:

1. Adanya pungutan kepada siswa yang di lakukan oleh Sekolah Dasar di Kota Dumai dengan alasan untuk kegiatan pembelajaran.
2. Belum optimalnya peranan Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dikarenakan luasnya cakupan bahasan yang harus diteliti dari implementasi fungsi pengawasan pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 022 Kota dan Sekolah Dasar Negeri 021 yang mana mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah terbesar tiap tahunnya. Peneliti membatasi pokok kajian agar dapat dilakukan telaah secara mendalam dan tepat sasaran pada peranan Dinas Pendidikan dalam mengawasi Dana BOS.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Ismi Solikhatun (2016) dan Tika Dwi Wahyuningsih (2016) telah meneliti tentang pengelolaan Dana BOS serta beberapa penelitian terdahulu lainnya lebih banyak membahas mengenai pengelolaan dan implementasi dana BOS sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini lebih melihat peranan Dinas Pendidikan dalam mengawasi Dana BOS di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Dumai. Melihat fenomena yang dipaparkan diatas dan ketertarikan peneliti terhadap studi ini, maka peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul : **“Peranan Dinas Pendidikan dalam Mengawasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai”**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah penelitian dengan pertanyaan bagaimana Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Dinas Pendidikan dalam Mengawasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

2. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Dinas Pendidikan Pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

b. Kegunaan Penelitian ini adalah

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang Peranan Dinas Pendidikan Dalam Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.
2. Bagi Akademis, Sebagai sumbangan dan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang pengawasan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
3. Bagi Teoritis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian-penelitian selanjutnya sesuai dengan topik yang dibahas.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintah dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan) jadi normatif, ideal dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik). Berdasarkan defenisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan

Menurut Ndraha (2003:6), pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dan kelompok.

Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (2003: 12), Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan

kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagaaian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.

Selanjutnya Ndraha menjelaskan (2003:7) bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal. Ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Lebih lanjutnya Ndraha (2003:7) menjelaskan ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga daapt diterima oleh yang bersangkutan saat dibutuhkan) dan kedua adalah sudut bagaimana seadanya (pada saat dibuthkan oleh yang yang bersangkutan, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik).

Menurut Yusri Munaf (2016:47), pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru, pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Yusri Munaf (2016:48) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses politik, alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat dalam penyelenggaraan sebuah Negara.

Konsep ilmu pemerintahan menurut H.Abrasz dalam Syafeei (2005;21) mengemukakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun secara keluar terhadap warganya.

Menurut (Admosudirdjo 1998;183), Management pemerintahan adalah management yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tindak pemerintahan (governmental act) yakni misalnya managemen daripada *government staff work*, *management kepolisian*, management daripada *legal drafting* (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Sedangkan menurut Ndraha (2003;5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tuntunan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil, sedangkan pamerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi:

- Fungsi Pembangunan
- Fungsi Pembeerdayaan dan
- Fungsi Pelayanan

Sedangkan perintah menurut Surianingrat (1992;10-11) adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

Pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid (2000 : 13) yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan sistem di Indonesia yang berlandaskan demokrasi, pemerintah tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini memiliki 3 (tiga) fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Ryasid (1997;14) mengemukakan 3(tiga) fungsi

-fungsi tersebut di Indonesia adalah;

1. Fungsi pengaturan yang dijalankan oleh MPR, Presiden dan DPR. MPR membuat dan mengubah undang-undang, membuat ketetapan-ketetapan MPR dan keputusan-keputusan MPR. Presiden bersama-sama dengan DPR membuat undang-undang, sementara Presiden sendiri membuat

- peraturan pemerintah, peraturan pemerintah mengamati undang-undang yang kedudukannya setara dengan undang-undang tetapi harus mendapat persetujuan DPR pada sidang berikutnya dan kalau tidak disetujui maka harus dicabut. Disamping itu presiden juga mempunyai hak untuk membuat keputusan presiden dan intruksi presiden.
2. Fungsi pemberdayaan yang dijalankan oleh pihak eksekutif / presiden. Lembaga ini sebagai pemegang wewenang untuk melaksanakan kebijakan yang ada dapat secara langsung mendorong pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian fungsi yang dilakukan pemerintah ini juga melibatkan MPR, terutama sekali melewati kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada didalam GBHN dan ketetapan-ketetapan lainnya.
 3. Fungsi pelayanan sebagaimana halnya dengan fungsi pemberdayaan, lebih banyak dilakukan oleh lembaga eksekutif / presiden. Hal ini dikarenakan lembaga ini yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diimplementasikan.

Ryasid (1997;14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak menjadi pemberontak dari dalam yang dapat mengulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas Negara melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban yang mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkan perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih baik.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tujuh tugas pokok diatas memperlihatkan adanya jangkauan tugas yang luas dan kompleks dengan tanggung jawab yang berat dipikili oleh pemerintah. Khusus dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemerintah terutama aparatur pemerintahan perlu mempedomani maksud dari suatu pelayanan.

2. Konsep Peranan

2.1 Pengertian Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis

kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan

mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10).

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antarperibadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarperibadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Peranan sebagai tokoh (Figurehead), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b. Peranan sebagai pemimpin (Leader), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
 - c. Peranan sebagai pejabat perantara (Liaison Manager), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:
 - a. Peran pemantau (Monitor), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut :
 1. Internal operations, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 2. Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (external events), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi,

- misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing-pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.
3. Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.
 4. Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.
 5. Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.
 - b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
 - c. Sebagai juru bicara (Spokesman), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:
- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
 - b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
 - c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya, Siswanto (2012 : 21).

Menurut David Berry (2003:105), mendefenisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial

tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma social dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan, Siswanto (2012:21).

Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal

yaitu :

4. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial dikenal ada empat meliputi :
 - a) Cara(Usage); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungnya.
 - b) Kebiasaan (folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.

- c) Tata kelakuan (mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
 - d) Adat istiadat (custom), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Soejono Soekanto (2012:174).
5. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 6. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Ada 4 ciri utama individu, yaitu:

1. Persepsi (perception) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.
2. Sikap (attitude) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya.
3. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.
4. Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2012:76).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

3. Konsep Kebijakan

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum (Anonymous, 1992).

Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
2. Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum. Sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai

bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan

Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain. Sedangkan jika

kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan

Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain. Dalam

penyusunan kebijaksanaan/kebijakan mengacu pada hal-hal berikut :

1. Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi.
2. Konsistensi dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku.
3. Berorientasi ke masa depan.
4. Berpedoman kepada kepentingan umum.
5. Jelas dan tepat serta transparan.
6. Dirumuskan secara tertulis.

Sedangkan kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah mempunyai beberapa tingkatan yaitu :

- a. Kebijakan Nasional

Yaitu kebijakan Negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional/negara sesuai dengan amanat UUD 1945 GBHN. Kewenangan dalam pembuat kebijaksanaan adalah MPR, dan Presiden bersama-sama dengan DPR. Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan dapat berupa :

- 1) UUD 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu) dibuat oleh Presiden dalam hal kepentingan memaksa setelah mendapat persetujuan DPR.

b. Kebijakan Umum

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Presiden yang bersifat nasional dan menyeluruh berupa penggarisan ketentuan-ketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai pelaksanaan UUD 1945, Ketetapan MPR maupun Undang-Undang guna mencapai tujuan nasional. Penetapan kebijaksanaan umum merupakan sepenuhnya kewenangan presiden, sedangkan bentuk kebijaksanaan umum tersebut adalah tertulis berupa peraturan perundang-undangan seperti halnya Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres) serta Instruksi Presiden (Inpres).

Sedangkan kebijaksanaan pelaksanaan dari kebijakan umum tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang tertentu. Penetapan kebijaksanaan pelaksanaan terletak pada para pembantu Presiden yaitu para Menteri atau pejabat lain setingkat dengan Menteri dan Pimpinan LPND sesuai

dengan kebijaksanaan pada tingkat atasnya serta perundang undangan berupa Peraturan, Keputusan atau Instruksi Pejabat tersebut (Menteri/Pejabat LPND).

c. Strategi Kebijakan

Merupakan salah satu kebijakan pelaksanaan yang secara hirarki dibuat setingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berupa Surat Keputusan yang mengatur tatalaksana kerja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia. Pengertian strategi merupakan serangkaian sasaran organisasi yang kemudian mempengaruhi penentuan tindakan komprehensif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan atau alat dengan mana tujuan akan dicapai.

4. Konsep Pengawasan

4.1 Pengertian Pengawasan

Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat maupun dilingkungan kerja, istilah pengawasan itu agaknya tidak terlalu sukar untuk dimengerti. Akan tetapi untuk memberikan suatu definisi atau batasan tentang pengawasan tidak mudah. Hal ini tampak dari beragamnya definisi tentang pengawasan, meskipun pada prinsipnya definisi tersebut pada umumnya tidak banyak berbeda.

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* karangan Poerwadarminta, kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada”, dan lain-lain. Kata “mengawasi” antara lain diartikan sebagai “melihat dan memperhatikan”. Sedangkan kata “kendali” diartikan

“*kekang*”, pengendalian berarti “pengekangan”, dan kata pengendali diberi arti ”pemimpin” atau orang yang mengendalikan.

Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata ”*controlling*” yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan.

Dari rumusan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut definisi tersebut tidak disajikan tujuan proses pengamatan, melainkan tujuan akhir dari pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh G.R. Terry, yang mengatakan bahwa:

“Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling).” (G.R Terry, 1991:15)

Menurutnya, pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena: “Apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri.” (Terry, 1991:137)

Hal tersebut juga didukung oleh Victor Situmorang dalam bukunya Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, yang mengatakan bahwa: “Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.” (Situmorang, 1994:8)

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mc. Farland seperti yang dikutip Handayaniingrat sebagai berikut: Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.” (Handayaniingrat, 1985:143)

Jadi pengawasan penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk

melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan itu sendiri didefinisikan oleh Sujamto dalam bukunya Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia sebagai: “Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.” (Sujamto, 1987:53)

Senada dengan pendapat diatas, M. Manulang dalam karyanya Dasar-dasar Manajemen, mendefinisikan pengawasan sebagai: “Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.” (H. Bohari, 1992:4)

Kedua pendapat tersebut diperkuat lagi oleh pernyataan Sondang P. Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi, yang menyatakan bahwa pengawasan adalah: “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.” (Siagian, 1984:135)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka secara singkat inti dari definisi pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Lebih rinci lagi, Kaho mendefinisikan pengawasan sebagai: “Suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-

penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efisien dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.”

4.2. Jenis-jenis Pengawasan

a. Jenis Pengawasan menurut Subyek

Dilihat dari subyeknya, Diharna dalam bukunya Pemeriksaan dalam Pengawasan, membedakan pengawasan menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen
2. Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional
3. Pengawasan Legislatif
4. Pengawasan Masyarakat
5. Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (Diharna, 1999:11)

Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen merupakan pengawasan yang berjalan secara otomatis yang terbentuk oleh sistem kerja dan apabila mendapatkan kesalahan, pelaksana/pimpinan satuan kerja langsung melakukan koreksi; bahkan berusaha mencegah terjadinya kesalahan. Pengawasan ini terjadi dengan adanya saling pengendalian atau saling melakukan pengawasan antar bagian dalam proses pelaksanaan karena diciptakannya “*tanding procedure*” dalam mekanisme kerja.

Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa dalam institusi pengawasan yang hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan atau perbaikan perencanaan. Aparat pemeriksa fungsional mempunyai norma pemeriksanaan sendiri.

Pengawasan Legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat biasanya dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana, kebijaksanaan, peraturan, dan menyoroti pula cara pelaksanaan. Pengawasan Masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat masyarakat, biasanya menyoroti kerugian atau terganggunya kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, atau masyarakatnya.

Sedangkan pengawasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan indikator tumbuhnya masyarakat madani, yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang makin kuat dalam ikut mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi lembaga yang mendominasi pengaturan kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya terdapat beberapa macam pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli, ditinjau dari beberapa segi. Menurut Sujamto, dari subyeknya pengawasan terbagi atas pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal (Sujamto) adalah: “Pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern dan ekstern”. Contohnya ialah pengawasan oleh BPK atau Inspektorat Jenderal terhadap instansi-instansi atau pejabat-pejabat atau proyek-proyek pemerintah. Sementara pengawasan informal menurut Sujamto, ialah: “Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Baik langsung maupun tidak langsung”.

b. Jenis Pengawasan Menurut Obyek

Jenis pengawasan menurut obyeknya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung didefinisikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut (on the spot). Sistem ini disebut pula sebagai “built of control.” (Sujamto, 1996:14)

Sedangkan pengawasan tidak langsung didefinisikan Sujamto sebagai: “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/pimpinan organisasi tanpa mendatangi obyek yang diawasi/diperiksa.” (Sujamto, 1996:14) Lazimnya, aparat/pimpinan yang melakukan pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan mempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diawasi.

c. Jenis Pengawasan Menurut Sifat dan Waktu

Jenis pengawasan menurut sifat atau waktu menurut Handayaniingat dapat dibedakan menjadi: pengawasan preventif dan pengawasan refresif.” (Handayaniingat, 2006:145-146)

Pengawasan preventif diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan, atau disebut pula sebagai pre-audit dalam sistem pemeriksaan anggaran.” (Handayaniingat, 2006:145) Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.
- b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya.
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai, dan pembagian pekerjaannya.
- e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. (Handayani, 2006:145)

Sedangkan pengawasan represif diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.” (Handayani, 2006:145) Maksudnya adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini dapat menggunakan 4 sistem pengawasan, yaitu: “Komperatif, Verifikatif, Insektif, atau Investigatif.” (Handayani, 2006:145-146)

4.3 Maksud, Tujuan, dan Fungsi Pengawasan

Dalam rangka melaksanakan pekerjaan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pengawasan. Menurut Leonard D. White seperti yang dikutip oleh Situmorang mengatakan bahwa maksud dari dilaksanakannya pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.

- b. Untuk melindungi Hak Azasi Manusia yang telah dijamin oleh Undang-undang dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan. (Situmorang, 1994:23)

Handayaniingrat menyebutkan bahwa: “Pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidasesuaian, penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Maksudnya adalah bukan mencari-cari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.” (Handayaniingrat, 2006:143)

Jadi pengawasan dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya tindakan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk mencegah atau memperbaiki penyimpangan agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dengan maksud di atas, maka pelaksanaan pengawasan diharapkan akan membawa hasil yang positif bagi tercapai tujuan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pekerjaan apakah berjalan lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Untuk dapat mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana sebagaimana yang telah ditetapkan.
5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
6. Memberikan saran tindak lanjut pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan dari pejabat yang berwenang. (Suradinata, 1996:56-57)

4.4 Pengawasan yang Efektif

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif sering diartikan sama dengan efisien, padahal keduanya mempunyai perbedaan. Prajudi Admosudihardjo menyatakan bahwa: “Kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumberdaya (resources) kita secara optimum untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu, dan kita berbicara tentang efektivitas bilamana kita hendak menekankan pada hasilnya atau efeknya, artinya sampai dimana prapta (obyektif) kita itu dapat di capai.” (Admosudihardjo, 2007:1710)

Senada dengan pendapat di atas, Widjadja juga memberi batasan efektifitas sebagai: “Pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik.” (Widjadja, 2008:79)

Pengertian ini juga menunjuk pada hasil yang di peroleh, dimana dapat dikatakan efektif apabila pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. Pengertian ini dikemukakan oleh H. Emerson seperti dikutip Handyaningrat, yang menyatakan bahwa: Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” (Handyaningrat, 2006:16).

Pendapat tersebut juga didukung oleh Komarudin, yang menyatakan bahwa: “Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.” (Komarudin, 1994:126)

Mengenai kriteria pengawasan yang efektif, Nawawi yang menggunakan istilah optimal untuk kata efektif, menyebutkan bahwa pengawasan akan optimal apabila:

1. Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan mengevaluasi tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga hasilnya benar-benar objektif.

2. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada setiap pejabat harus cepat, sehingga menentukan cepatnya untuk ditindaklanjuti.
3. Aparat diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan sebaliknya pihak yang dievaluasi harus mampu menerima wewenang tersebut sebagai suatu kewajiban.
4. Ruang lingkup pengawasan harus memadai sesuai dengan kebutuhan pimpinan tertinggi. (Nawawi, 1995:50)

Dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar manajemen, Manulang mengutip pendapat beberapa penulis asing tentang definisi pengawasan, sebagaimana dikutip oleh Sujamto. Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

Terry mendefinisikan :

“Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed result in keeping with the plan. (Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakantindakan korektif, bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana)”.

Newman mendefinisikan :

“Control is assurance that the performance to plan. (Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana)”.

Sedangkan Fayol mendefinisikan sebagai berikut :

“Control consist in verivying whether everything occur inconformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in order to rectivy then and prevent recurrence.(Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatuberlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, denganinstruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yangtelah digariskan. Ia bertujuan untuk menunjukkan (menemukan)kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksuduntuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali)”.

Atas dasar pendapat atau definisi tersebut, Manulang (2012:37) memberikan definisi mengenai pengawasan sebagai berikut :

”Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.

Dari definisi tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang telah dilaksanakan yang sesuai dengan rencana.

Menurut Manullang (2012:38) untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus perlu dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan yang terdiri dari :

1. Menetapkan alat ukur (*standard*) Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.
2. Mengadakan penilaian (*evaluate*) Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.
3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corective action*) Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana

4.5 Prinsip-prinsip Pengawasan

Sedangkan menurut Silalahi (1992:178) prinsip-prinsip pengawasan adalah:

1. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
2. Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.

3. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
6. Pengawasan harus fleksibel.
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Plan and Objective Oriented).
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan atau control by exception.
9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (Corrective Action).

Selain dan itu menurut Soehary dan Effendi (2003;101) bahwa prinsip prinsip dan pengawasan antara lain adalah;

1. Objektif dan menghasilkan.
2. Pengawasan berpedoman pada kebijaksanaan yang berlaku.
3. Preventiv.
4. Pengawasan bahwa tujuan
5. Efisiensi
6. Menentukan apa yang salah
7. Tindak lanjut

4.6 Langkah-langkah Pengawasan

Selanjutnya Soehary dan Effendi (2003;102) juga menyatakan bahwa langkah langkah dalam pengawasan antara lain adalah;

1. Penetapan tolok ukur
2. Menetapkan metode
3. Pengukuran pelaksanaan dan perbandingan
4. Tindak lanjut

Selain itu Friedrich (dalam Islamy;1988;1.4) juga mendefinisikan Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan.

Siagian (2003;126), pelaksanaan tugas adalah “ suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada”. Selanjutnya mengenai pelaksanaan tugas adalah merupakan aktifitas yang dilaksanakan para anggota organisasi di dalam bidang tugas yang diberikan kepadanya.

Suwignjo (2006;110) menyatakan bahwa pengawasan adalah keseluruhan kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pengawasan ini antara lain adalah;

- a. Pengamatan dilapangan
- b. Inspeksi langsung
- c. Pelaporan

5. Konsep Pendidikan

Pendidikan bukan hanya menyampaikan keterampilan yang sudah dikenal, tetapi harus dapat meramalkan berbagai jenis keterampilan dan kemahiran yang akan datang, dan sekaligus menemukan cara yang tepat dan cepat supaya dapat dikuasai oleh anak didik.

Pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara/masyarakat, dengan memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Dilihat dari sudut perkembangan yang dialami oleh anak, maka usaha yang sengaja dan terencana tersebut ditujukan untuk membantu anak dalam meghadapi dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang

dialaminya dalam setiap periode perkembangan. Dengan kata lain, pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan dalam perkembangan anak.

Branata (1988) mengungkapkan bahwa pendidikan ialah usaha yang sengaja diadakan, baik langsung maupun secara tidak langsung, untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaan. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Purwanto (1987:11) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat.

Kleis (1974) memberikan batasan umum bahwa :”pendidikan adalah pengalaman yang dengan pengalaman itu, seseorang atau kelompok orang dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Pengalaman itu terjadi karena ada interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya. Interaksi itu menimbulkan proses perubahan (belajar) pada manusia dan selanjutnya proses perubahan itu menghasilkan perkembangan (development) bagi kehidupan seseorang atau kelompok dalam lingkungannya”.

6. Program Dana BOS

Program BOS adalah program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah.

Dana BOS yang merupakan anggaran dari APBN yang disalurkan pada daerah bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain agar memperoleh layanan pendidikan dasar, yang mana dana BOS ini disalurkan oleh pemerintah pusat setiap satu tahun sekali.

Berdasarkan Buku Panduan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (2006:141) diketahui bahwa terdapat beberapa langkah dalam melakukan pertanggungjawaban antara lain:

- a. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah
- b. Pengolahan dana BOS
- c. Pembukuan
- d. Bukti pengeluaran
- e. Pelaporan
- f. Waktu pelaporan

B. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	INDIKATOR	PERBEDAAN
1	Ismi Solikhatun 2016	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta)	Transparan Demokratis Efektif dan efisien	Variabel penelitian berbeda, peneliti memakai variabel pengawasan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pengelolaan serta objek penelitian juga berbeda
2	Ega Rezky Hastyarni 2015	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (Bos Sma) Di Sma Negeri 1 Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Tahun 2014	Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan dan evaluasi Pelaporan	Variabel penelitian berbeda, peneliti memakai variabel pengawasan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pengelolaan serta objek penelitian juga berbeda
3	Kartika Eva	Penggunaan Dana	Hambatan dalam	Metode penelitian

	Prestyana 2015	Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri Gugus Sari Kelapa Kecamatan Cilongok	menjalankan program BOS Penggunaan dana Bos	berbeda,peneliti menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif, Variabel penelitian berbeda, peneliti memakai variabel pengawasan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel Rencana Kegiatan dan anggaran, serta objek penelitian juga berbeda
--	-------------------	--	--	---

Dalam penelitian penulis yang berjudul “**Peranan Dinas Pendidikan dalam Mengawasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai**” . penulis lebih memfokuskan penelitian ke pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena yang penulis lihat di penelitian terdahulu lebih memfokuskan ke Penggunaan Dana BOS.

C. Kerangka Pikiran

Dalam melakukan peranannya Dinas Pendidikan perlu memperhatikan tugas dan fungsinya hal ini untuk melihat apakah tugas yang di jalankannya telah sesuai dengan rencana semula atau tidak maka selanjutnya disini akan dapat dilihat kerangka pikiran dari Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Dumai Timur yaitu;

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Kecamatan Dumai Timur



Sumber : Modifikasi Peneliti, 2017

D. Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian keadaan, kelompok, atau individu.

Sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran diatas, penulis mencoba mengkombinasikan konsep teori beberapa pakar dan menurut ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini akan menjadi variabel penelitian adalah;

1. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan
4. Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakuan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
5. Pengamatan dilapangan adalah melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang akan di awasi
6. Inspeksi langsung yaitu melakukan inspeksi secara langsung ke objek yang akan di awasi mengenai penggunaan dana BOS
7. Pelaporan adalah melakukan pelaporan secara berkala mengenai hasil inspeksi yang telah dilakuan mengenai penggunaan dana BOS

E. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dari Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kecamatan Dumai Timur adalah sebagai berikut;

Tabel II.2 Operasional Variabel Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Dumai Timur

Konsep	variabel	Indikator	Intem yang Dinilai/penelitian	Ukuran
Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (Manullang)	Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.pengamatan dilapangan	<ol style="list-style-type: none"> Mencari informasi tentang pengelolaan dana BOS Keefektifan Dana Bos berdasarkan pengamatan lapangan Memantau aktifitas petugas dilapangan Mengumpulkan data terkait penerima dana BOS Mengumpulkan data terkait data pembelanjaan dana BOS Mengumpulkan data terkait pengalokasian dana BOS 	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		2.inspeksi langsung	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemeriksaan pembukuan keuangan dana BOS Kualitas pembukuan keuangan Dana BOS Pertanggungjawaban Bendahara Keluhan dan pengaduan dari guru, komite, maupun orang tua Laporan pembelanjaan dana BOS Memeriksa/inspeksi langsung ke sekolah- 	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>

			sekolah	Baik
			1. Pelaporan Bendahara Sekolah	Cukup Baik
		3.pelaporan	2. Pengawasan kepala sekolah	Kurang Baik
			3. Pengawasan komite sekolah	
			4. Diminta laporan secara tertulis	
			5. Pelaporan dibagikannya dana BOS	
			6. Adanya audit dari tim auditing	

B. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan terhadap variabel penelitian yaitu Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Kampar akan dikategorikan dengan tiga kategori Terlaksana, Cukup Terlaksana, Kurang Terlaksana.

Ukuran indikatornya sebagai berikut;

- Baik** : Jika hasil penelitian terhadap indikator peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Kecamatan Dumai Timur tersebut sesuai dengan jawaban responden berkisar antara 67%-100%
- Cukup Baik** : Jika hasil penelitian terhadap indikator Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Kecamatan Dumai Timur dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan persentase atau jawaban responden berkisar antara 34%-66
- Kurang Baik** : jika hasil penelitian terhadap indikator Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Kecamatan Dumai Timur dapat dilaksanakan dengan jawaban responden berkisar antara 1%-33%

Sedangkan untuk ukuran indikator-indikator dari Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Kecamatan Dumai Timur adalah;

a. Pengamatan dilapangan

Baik Apabila 3 atau semua kriteria yang ada telah dapat dijalankan dalam pengamatan dilapangan atau jawaban responden berada pada skor $\geq 67\%$

Cukup Baik Apabila hanya dua kriteria yang dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34%-66%

Kurang Baik Apabila tidak ada sama sekali atau hanya 1 kriteria yang terlaksana atau jawaban responden berada pada skor $\leq 33\%$

b. Inspeksi langsung;

Baik Apabila 3 atau semua kriteria yang ada telah dapat dijalankan dalam pengamatan dilapangan atau jawaban responden berada pada skor $\geq 67\%$

Cukup Baik Apabila hanya dua kriteria yang dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34%-66%

Kurang Baik Apabila tidak ada sama sekali atau hanya 1 kriteria yang terlaksana atau jawaban responden berada pada skor $\leq 33\%$

c. Pelaporan

Baik Apabila 3 atau semua kriteria yang ada telah dapat dijalankan dalam pengamatan dilapangan atau jawaban responden berada pada skor $\geq 67\%$

Cukup Baik Apabila hanya dua kriteria yang dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34%-66%

Kurang Baik Apabila tidak ada sama sekali atau hanya 1 kriteria yang terlaksana atau jawaban responden berada pada skor $\leq 33\%$

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Mengacu dari rumusan penelitian, bahwa data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui survey dijadikan dasar untuk mendeskripsikan setiap indikator. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikategorikan ; Tipe survey Deskriptif dengan metode kuantitatif yaitu pengumpulan data dengan jalan menggunakan kuisioner dan serta menguraikan setiap data dari hasil jawaban responden.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Dumai Timur dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Dumai merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang melaksanakan program Dana Bantuan Operasional (BOS) pada Sekolah Dasar.
2. Masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan Dana Bantuan Operasional (BOS) pada Sekolah Dasar di Kota Dumai, detailnya dijelaskan pada fenomena masalah di bagian latar belakang.
3. Disamping pertimbangan diatas, alasan peneliti mengambil penelitian di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai karena merupakan asal

tempat tinggal penulis, sehingga penulis mengetahui permasalahan yang berkaitan didalam penelitian ini dan ini memudahkan penulis untuk memperoleh data penelitian agar hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan Dana Bantuan Operasional (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Untuk jelasnya mengenai populasi sampel ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1. Jumlah populasi dan sampel

No	Sub populasi	populasi	sampel	Persentase
1	Kepala sekolah	2	2	100%
2	Pengawas Sekolah	2	2	100%
3	Orang Tua Siswa	223	30	15%
	Jumlah	227	34	

D. Teknik Penarikan Sampel

Untuk populasi bagi Bendahara Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan pengawas sekolah di gunakan cara teknik sensus dikarenakan jumlahnya sedikit dan masih bisa di temui dalam satu wilayah, sedangkan untuk orang tua siswa digunakan teknik *purposive sampling* atau responden yang dijadikan sumber informasi diambil berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilakuakn di lokasi penelitian

E. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data diperoleh langsung dari responden melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan daftar pertanyaan yang meliputi data tentang;
 1. Identitas responden, yang meliputi; umur, tingkat pendidikan, jabatan, masa kerja.
 2. Indikator yang terdiri, pengamatan dilapangan, inspeksi langsi dan pelaporan
- b. Data Sekunder, yaitu;
 1. Data yang diperoleh melalui;
 2. Buku-buku
 3. Struktur organisasi

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun penulis, sesuai dengan indikator penelitian, dan ditujukan kepada seluruh responden dengan jalan menyebarkan kuisisioner pada setiap responden. Penulis menggunakan teknik kuisisioner untuk melihat jawaban responden atas pertanyaan terstruktur dari indikator-indikator penelitian.
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung terhadap responden dan dimana penulis menggunakan daftar pertanyaan yang jelas, dan gunakan untuk mengumpulkan data dari informan yang dilakuakn dengan Kepala Dinas Pendidikan. Penulis menggunakan teknik wawancara untuk sampel yang diambil dengan metode sensus, karena jumlah sampel yang sedikit memungkinkan untuk melakukan wawancara.
- c. Observasi pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, terkait dengan objek penelitian selama kurun waktu penelitian

- d. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari narasumber.

G. Teknik Analisa Data

Setelah seluruh data diperlukan terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan dan ditabulasikan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan secara defkriptif yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian, untuk itu teknik dianalisis secara kuantitatif karena menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuisisioner.

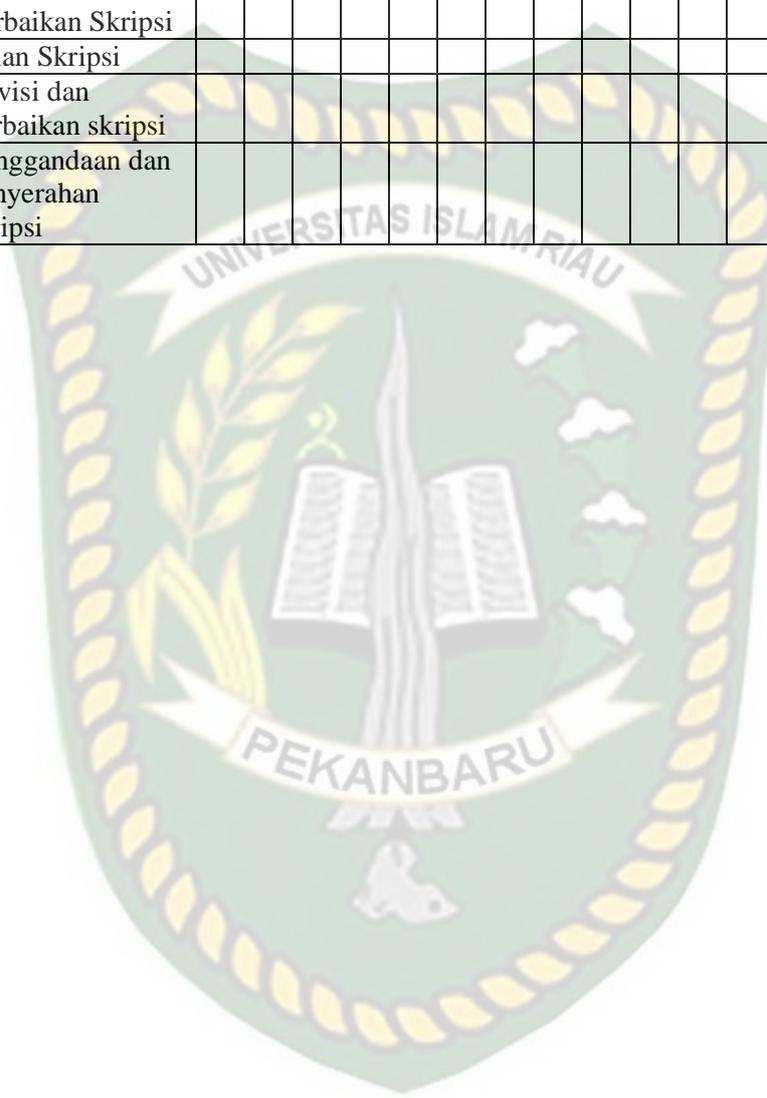
H. Jadwal Waktu Kegiatan

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Desember 2020 hingga diperkirakan selesai pada pertengahan Desember 2020, untuk lebih jelasnya waktu kegiatan dapat dilihat pada tabel III.2

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Mengawasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu															
		Juli 2020				Agustus 2020				September 2020				Oktober 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x	X	X	X												
2	Seminar UP					x											
3	Perbaikan UP						x	x									
4	Pembuatan daftar kuisisioner								x	x							
5	Pengurusan rekomendasi Penelitian								x								
6	Penelitian lapangan								x	x	x						
7	Penelitian dan								x	x	x	x					

	analisis data																	
8	Penyusunan laporan Penelitian (skripsi)									X	X	X						
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi												X	X				
10	Ujian Skripsi														X			
11	Revisi dan perbaikan skripsi													X	X			
12	Penggandaan dan penyerahan skripsi																	X



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mengenai Kota Dumai

Kota Dumai adalah sebuah Kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 Km dari Kota Pekanbaru. Sebelumnya, Kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari. Namun semenjak Manokwari pecah dan terbentuk kabupaten Wasior, maka Kota Dumai pun menjadi yang terluas. Tercatat dalam sejarah, Dumai adalah sebuah dusun kecil timur di Pesisir Timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pulau Sumatra.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis . diresmikan sebagai Kota pada 20 april 1999, dengan UU No. 16 Tahun 1999. Pada awal pembentukan, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².13

Berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk 2016 penduduk Kota Dumai keadaan sampai tanggal 31 mei 2016 berjumlah 553.178 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun dari hasil Sensus Penduduk 2016 sebesar 5,54 persen. Dengan demikian sex ratio penduduk Kota Duami adalah sebesar 108. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan terdapat sekitar 108 orang laki-laki.

Pemekaran kecamatan terjadi pada tahun 2012. Dalam tahun 2013, kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan

dumai Kota yaitu sebanyak 3.216 jiwa per km², sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Medang Kampai sebanyak 30 jiwa per km².

Kota Dumai berada di bagian pojok atas Provinsi Riau, dengan luas wilayah sebesar 3,51 persen dari total luas daratan Provinsi Riau dan berada di wilayah dataran pada ketinggian sekitar 5 meter di atas permukaan laut.

a. Batas Wilayah

Kota Dumai berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah utara : Selat Rupat
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis
3. Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis
4. Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir

b. Iklim

Selama tahun 2017 rata-rata suhu udara 28.32 °C dan terjadi hujan sebanyak 168 hari. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Agustus dengan 499 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 18 hari. Sedangkan curah hujan terendah tercatat pada bulan Juni dengan 49 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 7 hari.

c. Geografis

Dilihat dari lokasi geografis wilayah, 33 kelurahan di Kota Dumai terletak di pesisir pantai dan pada daerah datar. Di wilayah kota Dumai terdapat 15 sungai dengan Sungai Buluala sebagai sungai terpanjang 40 km dan sungai Tanjung Leban sebagai sungai terpendek yaitu sepanjang 3 km.

Kemudian pada tahun 2013 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 7 kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang ada di Dumai yaitu antara lain :

1. Kecamatan Bukit Kapur
2. Kecamatan Medang Kampai
3. Kecamatan Sungai Sembilan
4. Kecamatan Dumai Barat
5. Kecamatan Dumai Timur
6. Kecamatan Dumai Kota
7. Kecamatan Dumai Selatan

d. Visi dan Misi Kota Dumai

1. VISI

“ Terwujudnya Kota Dumai sebagai pusat pelayanan “Pengantin” (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism Dan Industri) yang “Berseri” (Bersih, Semarak, Rukun Dan Indah) dikawasan pantai timur sumatra sebagai penggerak kemajuan ekonomi dan budaya melayu yang agamis menuju Dumai Kota “Sehat” (Sejahtera, Harmonis, Aman, Tertib) “

2.MISI

- 1) Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan untuk peningkatan daya beli masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan yaitu sektor PENGANTIN (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism, dan Industri)
- 2) Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta kemampuan dalam penguasaan teknologi dan keahlian spesifikasi yang dapat diandalkan.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kualitas infrastruktur baik yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna mendorong perkembangan

Kota Dumai menjadi Kota yang BERSERI (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah).

- 4) Mengembangkan kemampuan aparaturnya pemerintah agar dapat tercipta pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih KKN serta beribawa dan mampu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif yang dapat mempeaskan masyarakat pada umumnya serta investor pada khususnya.
- 5) Mengembangkan budaya melayu sebagai jati diri Kota Dumai dan Budaya tempatan guna memotivasi peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan penyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu dan budaya tempatan.

B. Gambaran Umum Mengenai Pendidikan di Kota Dumai

Di kota Dumai terdapat sebanyak 115 buah Sekolah Dasar, sedangkan di Kecamatan Dumai Timur terdapat 20 Sekolah Dasar, dari pengamatan awal di beberapa Sekolah Dasar di Kecamatan Dumai Timur terindikasi sejumlah permasalahan mengenai penggunaan Dana Bos.

Tabel 4.1. Jumlah sekolah Dasar di Kecamatan Dumai Timur

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Kelurahan	Jumlah Siswa
1	10495070	SD NEGERI 017 BULUH KASAP	Jl. Sultan Syarif Kasim	BULUH KASAP	224
2	10494343	SD NEGERI 015 BULUH KASAP	Jl. Hang Tuah	BULUH KASAP	505
3	10404349	SD NEGERI 005 TELUK BINJAI	Jl. Sultan Syarif Kasim	TELUK BINJAI	427
4	10494335	SD NEGERI 021 TANJUNG PALAS	Jl. Budi, Rejosari	TANJUNG PALAS	452
5	10495075	SD NEGERI 014 BULUH KASAP	Jl. Sultan Syarif Kasim	BULUH KASAP	304

6	10494336	SD NEGERI 025 TELUK BINJAI	JALAN KESEHATAN	TELUK BINJAI	306
7	10494346	SD NEGERI BINAAN KHUSUS KOTA DUMAI	Jl. Sultan Syarif Kasim	TELUK BINJAI	271
8	10404353	SD NEGERI 007 TELUK BINJAI	Jl. Jendral Sudirman Gg. Srilanggam	TELUK BINJAI	340
9	10494322	SD NEGERI 023 TELUK BINJAI	Jl.Jend Sudirman Gg. Srilanggam	TELUK BINJAI	157
10	10404347	SD NEGERI 004 TELUK BINJAI	Jl. Sultan Syarif Kasim	TELUK BINJAI	492
11	10495083	SD NEGERI 024 TELUK BINJAI	Jl. Jend. Sudirman, Gg. Srilanggam	TELUK BINJAI	200
12	10495081	SD NEGERI 020 JAYA MUKTI	Jl Kesuma Gg.Flamboyan	JAYA MUKTI	371
13	10494323	SD NEGERI 028 SRI PULAU	Rt 12 Sri Pulau	TANJUNG PALAS	63
14	10494325	SD NEGERI 027 BUKIT BATREM	Jln Swadaya Bukit Batrem	BUKIT BATRM	630
15	10494522	SD NEGERI 016 BULUH KASAP	Jl. Sultan Syarif Kasim	BULUH KASAP	317
16	10495082	SD NEGERI 022 JAYAMUKTI	Jl. Teladan	JAYAMU KTI	545
17	10495067	SD NEGERI 006 TELUK BINJAI	Jl. Jend Sudirman Gg Srilanggam	TELUK BINJAI	300
18	10405029	SD NEGERI 010 JAYAMUKTI	Jl. Kaharudin Nasution	JAYA MUKTI	319
19	10494342	SD NEGERI 013 BULUH KASAP	Jl. Sultan Syarif Kasim	BULUH KASAP	345
20	10494317	SD NEGERI 009 TANJUNG PALAS	Tanjung Palas	TANJUNG PALAS	303

Sumber:Referensi data kemdikbud, 2017

Dinas Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- h. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan;
- i. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- j. Membina dan melaksanakan urusan dibidang pendidikan;

- k. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
- l. Membina unit pelaksanaan teknis di lingkup tugasnya;
- m. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas pendidikan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, maka Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- g. Perumuskan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- h. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- i. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
- j. Pembinaan dan pelaporan;
- k. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas Pendidikan; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

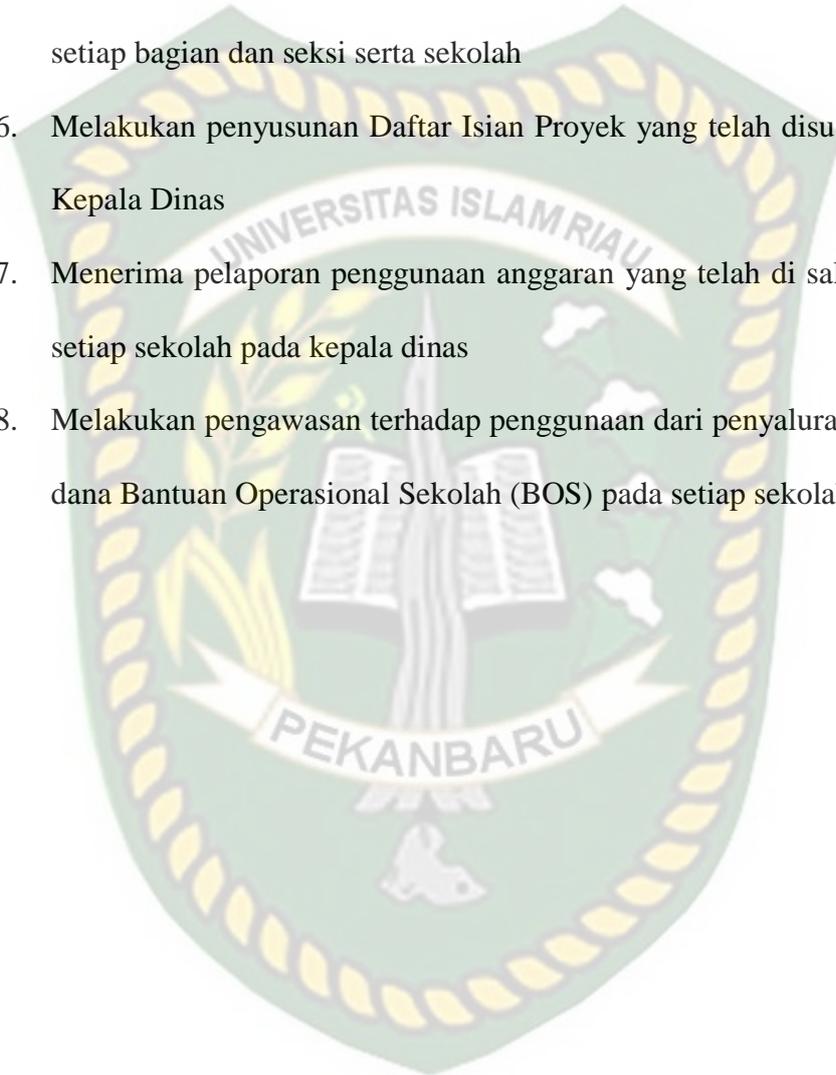
Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan tersebut maka berdasarkan Perda nomor 14 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah telah ditetapkan uraian tugas dari organisasi Dinas Pendidikan yaitu sebagai berikut:

- h. Kepala Dinas Pendidikan;
- i. Sekretaris, Membawahi:

4. Sub Bagian Kepegawaian, Umum Dan Perlengkapan;
5. Sub Bagian Keuangan;
6. Sub Bagian Penyusunan Program.
- j. Bidang Pengembangan Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar, Membawahi:
 4. Seksi Taman Kanak-Kanak;
 5. Seksi Sekolah Dasar;
 6. Seksi Sarana Dan Prasarana Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar.
- k. Bidang Pengembangan Sekolah Menengah, Membawahi:
 4. Seksi Sekolah Menengah Pertama (Smp);
 5. Seksi Sekolah Menengah Atas (Sma)/ Sekolah Menengah Kejuruan (Smk);
 6. Seksi Sarana Dan Prasarana Smp/Sma/Smk.
- l. Bidang Pengembangan Luar Sekolah, Membawahi:
 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (Paud);
 4. Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
- m. Badan Pengembangan Kesiswaan, Membawahi:
 4. Seksi Kesenian;
 5. Seksi Penjaskes Sekolah;
 6. Seksi Kreatifitas Siswa.
- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd);
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Salah satu sub bagian dari Dinas Pendidikan adalah Sub Bagian Keuangan yang tugasnya sebagai berikut:

5. Menyusun dan mendata penggunaan anggaran setiap tahunnya pada setiap bagian dan seksi serta sekolah
6. Melakukan penyusunan Daftar Isian Proyek yang telah disusu bersama Kepala Dinas
7. Menerima pelaporan penggunaan anggaran yang telah di salurkan bagi setiap sekolah pada kepala dinas
8. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dari penyaluran anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada setiap sekolah.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan Bab V ini, penulis atau peneliti merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari para responden. Oleh karena itu hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan oleh para responden, adapun identitas responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Umur Responden

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas – tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kinerja seseorang. Semakin lanjut umur atau usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, Tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan kelemahan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan tubuh yang berkurang dan lain-lain. Adapun tingkat umur responden yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada tabel V.1 berikut:

Tabel V. 1 Jumlah Keseluruhan Responden berdasarkan Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase
1	20-30 tahun	4 orang	11,43 %
2	30 – 40 tahun	24 orang	68,57 %
3	➤ 40 tahun	7 orang	20 %
Jumlah		35 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden yang menjadi responden dalam penelitian ini berada pada umur 30-40 tahun yakni sebanyak 24 orang atau 68,57% dan responden dengan umur >40 tahun berjumlah 7 orang atau dengan persentase 20 % dan paling sedikit yakni jumlah responden dengan kategori umur 20 – 30 tahun yakni hanya 4 orang atau dengan persentase 11,43%. Sehingga dapat disimpulkan mayoritas responden berada pada tingkat umur 30-40 tahun.

2. Jenis Kelamin

Identitas responden selanjutnya yakni jenis kelamin, berikut ini diuraikan jenis kelamin responden yang menjadi responden untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.2 berikut :

Tabel V. 2 Jumlah Keseluruhan Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Perempuan	20 orang	57,14 %
2	Laki-laki	15 orang	42,86 %
Jumlah		35 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel V.2 dapat diketahui bahwa responden laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang tidak terlalu jauh berbeda yakni hanya selisih 5 orang. Untuk responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 20 orang atau 57,14% sedangkan responden dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 15 orang atau dengan persentase 42,86%

3. Pendidikan Responden

Dalam sebuah penelitian, jawaban yang diberikan oleh responden dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini

dikarenakan jawaban setiap responden tentunya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang memanglah tidaklah sama persis antara yang satu dengan satu lainnya., dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah penelitian tersebut. Pemahaman seseorang responden terhadap masalah penelitian tidak kaan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia tempuh.

Biasanya, pemahaman seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik daripada seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan responden cukup variatif mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Strata – I sampai dengan Strata II. Adapun tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.3 berikut:

Tabel V. 3 Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA	7 orang	20%
2	Strata-I	18 orang	51,43 %
3	Strata-II	8 orang	22,86 %
Jumlah		35 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel V.3 dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir SMA sejumlah 7 orang atau 20%, strata I dengan jumlah 18 orang atau 51,43% kemudian untuk tingkat strata II sejumlah 8 orang atau dengan persentase 22,86%.

5.2 PERANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Secara umum program bantuan oprasional sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program bantuan oprasional sekolah bertujuan untuk:

4. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Sekolah Menengah Pertama Terbuka (Terbuka) Negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih
5. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta
6. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Kota Dumai. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program bantuan oprasional sekolah. Tahun anggaran 2020, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2020, yaitu semester 2 (dua) tahun pelajaran 2018/2019 dan semester 1 (satu) tahun pelajaran 2019/2020.

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3(tiga) bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Khusus untuk sekolah

di daerah terpencil, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan 6(enam) bulanan. Penetapan daerah terpencil dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan secara khusus, atas usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencakup :

14. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan.
15. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan)
16. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, Pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan (PAKEM), pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba)
17. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa)
18. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor
19. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset

20. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
21. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah dasar diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi bantuan oprasional sekolah
22. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, musyawarah guru mata pelajaran dan musyawarah kerja kelompok kepala sekolah. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan musyawarah kerja kelompok kepala sekolah atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana bantuan oprasional sekolah untuk peruntukan yang sama
23. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin . Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)
24. Pembiayaan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti alat tulis kantor (ATK) termasuk tinta printer, CD dan flash disk, penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Bank/PT Pos
25. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran
26. Bila seluruh komponen 1 sampai dengan 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan mebeler sekolah.

Di kota Dumai terdapat sebanyak 115 buah Sekolah Dasar, sedangkan di Kecamatan Dumai Timur terdapat 20 Sekolah Dasar, dari pengamatan awal di beberapa Sekolah Dasar di Kecamatan Dumai Timur terindikasi sejumlah permasalahan mengenai penggunaan Dana Bos.

Berdasarkan pengamatan dilapangan yang dilakukan, di Sekolah Dasar yang ada di Kota Dumai masih terdapatnya berbagai fenomena permasalahan dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah, diantaranya:

3. Berdasarkan hasil observasi penulis dengan orang tua siswa, beberapa orang tua mengeluhkan masih adanya pungutan kepada siswa yang dilakukan oleh Sekolah Dasar di Kota Dumai.
4. Berdasarkan hasil observasi penulis, Terindikasi kurangnya personalia dan Sumber Daya Manusia pengawas jika dibandingkan dengan sekolah yang akan di awasi, sehingga pengawasan yang dilakukan belum berjalan maksimal.

Dikarenakan luasnya cakupan bahasan yang harus diteliti dari implementasi fungsi pengawasan pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 022 Kota dan Sekolah Dasar Negeri 021 yang mana mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah terbesar tiap tahunnya. Peneliti membatasi pokok kajian agar dapat dilakukan telaah secara mendalam dan tepat sasaran pada peranan Dinas Pendidikan dalam mengawasi Dana BOS.

Oleh karena itu penulis menetapkan beberapa indikator dari peranan Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam mengawasi dana BOS yang akan menjadi tolak ukur penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan di Lapangan

Pengamatan dilapangan perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan kota Dumai untuk melihat sejauh mana Sekolah Dasar Negeri 021 dan 022 Kota Dumai mengelola dana BOS dengan baik. Apakah alokasi atau sasaran dana sudah benar, dan apakah dana BOS tersebut dapat efektif digunakan untuk keperluan yang memang sudah sesuai dengan juknis Dana BOS.

Dalam rangka peran Dinas Pendidikan dalam mengawasi penggunaan Dana BOS, maka pengamatan dilapangan berfungsi dalam pengumpulan informasi mengenai pengelolaan dana di sekolah-sekolah, pengamatan dilapangan dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan mendatangi langsung ke sekolah-sekolah dan melihat laporan penggunaan/alokasi dana BOS terebut.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator pengamatan dilapangan dapat dilihat hasil tanggapan responden berikut:

Tabel V.4 Tanggapan Responden Terhadap indikator Pengamatan di lapangan

No	Item Penilaian Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Ada	Kadang-kadang	Tidak Ada	
1	Apakah Bapak/Ibu pernah mencari informasi yang berkaitan tentang pengelolaan dana Bos di SDN 021 dan 022 Kota Dumai?	15	10	5	30
2	Berdasarkan pengamatan dilapangan, apakah pengelolaan dana BOS sudah efektif	10	5	15	30
3	Apakah pihak pengawas dari Dinas Pendidikan melalukan pengamatan lapangan terhadap pengelolaan dana BOS	12	8	10	30
4	Apakah pihak Dinas pendidikan ada mencari data tentang data penerima dana BOS	8	14	8	30
5	Apakah pihak Dinas pendidikan ada mencari data tentang data pembelanjaan di tiap sekolah	17	10	3	30
6	Apakah pihak Dinas pendidikan	10	12	8	30

ada mencari data tentang pengalokasian dana di tiap sekolah				
Jumlah	72	59	49	180
Rata-Rata	12	10	8	30
Persentase (%)	40%	33,33%	26,67%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator pengamatan dilapangan dapat dilihat bahwa sejumlah 12 orang atau 40% memberikan tanggapan baik karena sudah adanya peranana Dinas Pendidikan kota Dumai ke lapangan terkait penggunaan dan pengalokasian dana BOS di SDN 021 dan 022 Kota Dumai. Kemudian 10 responden lainnya atau 33,33% memberikan tanggapan kadang-kadang karena pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap SDN 021 dan 022 Kota Dumai hanya dilakukan kadang-kadang, pengawasan ke lapangan tidak dilakukan konsisten atau terjadwal. Sedangkan responden yang memberikan tanggapan tidak adanya pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait mencari informasi penggunaa Dana BOS hanya sekitar 8 orang atau sebesar 26,67%. Sehingga dari data tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Dinas Pendidikan dalam pengawasan/pengamatan kelapangan sudah ada dilakukan meskipun masih ada responden yang berpendapat pengamatan tersebut tidak konsisten atau terjadwalkan. Pengamatan dilapangan masih kurang baik karena item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 40%.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 15 Juni 2020 pukul 10.00 WIB dengan salah seorang staf Dinas Pendidikan kota Dumai

mengenai pengawasan yang dilakukan terkait penggunaan Dana BOS yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui data yang menjadi dasar pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai berikut wawancara penulis dengan staf Dinas Pendidikan Kota Dumai:

“Setiap sekolah baru, melapor ke Dinas Pendidikan, lalu Dinas Pendidikan akan membuatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Dan sekolah akan memiliki data Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dimana sekolah akan mendata secara online jumlah siswa/i yang ada disekolah. Data akan dilaporkan kepusat maka dana akan diturunkan sesuai data yang diberikan sekolah. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Dumai akan melakukan pengawasan secara langsung mengenai jumlah siswa/i di sebuah sekolah apa sesuai atau tidak dengan data yang dilaporkan, dengan turun langsung ke sekolah”. (Wawancara dengan ibu Linda selaku staf kepala seksi Sekolah Dasar (SD) Dinas pendidikan Kota Dumai, 15 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa yang menjadi data pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Dumai adalah data yang telah di isi secara online oleh setiap sekolah mengenai jumlah siswa/i yang terdapat di sekolah. Sehingga pihak pengawas Dinas Pendidikan Kota Dumai menjadikan informasi tersebut sebagai data di dalam melakukan pengawasan atau pengamatan dilapangan.

Tabel.V.5. Hasil Observasi Terkait Pengamatan Dilapanagan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Bentuk kegiatan	Kegiatan melakukan wawancara
2	Pengundang/Pelaksana kegiatan	Pengundang : Dinas pendidikan dan Orang tua murid Pelaksana : mahasiswa yang melakukan penelitian
3	Waktu kegiatan	Senin,15 Juni 2020 Jam : 10.00 – 12.00
4	Tempat kegiatan	Ruangan Pengawas sekolah dan di Sekolah Dasar Negeri 021 dan 022 Kota Dumai
5	Actor yang terlibat	2 orang staf Dinas Pendidikan bagian Pengawas Sekolah Dasar dan 30 orang tua murid
6	Hasil observasi	Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa yang menjadi data pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

		<p>Pendidikan Kota Dumai adalah data yang telah diisi secara online oleh setiap sekolah mengenai jumlah siswa/siswi yang terdapat disekolah, sehingga Dinas Pendidikan menjadikan informasi tersebut sebagai data di dalam melakukan pengawasan atau pengamatan dilapangan.</p> <p>Peranan dinas pendidikan dalam pengawasan/pengamatan kelapangan sudah ada dilakukan meskipun masih ada responden yang berpendapat pengamatan tersebut tidak konsisten atau terjadwalkan. Pengamatan dilapangan masih kurang baik karena item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 40%.</p>
--	--	---

2. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung yang dilakukan Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah juga merupakan salah satu peranan Dinas Pendidikan dalam mengawasi penggunaan dana BOS. Setelah Dinas Pendidikan melakukan pengamatan langsung terkait informasi/data yang akan dipakai dalam pengawasan, Dinas Pendidikan juga berperang memeriksa atau melakukan inspeksi secara langsung terkait pelaporan penggunaan Dana BOS di sekolah-sekolah.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator inspeksi secara langsung dapat dilihat hasil tanggapan responden berikut:

Tabel V.6 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Inspeksi Langsung

No	Item Penilaian Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Ada	Kadang-kadang	Tidak Ada	
1	Apakah menurut Bapak/Ibu, pihak pengelola dana BOS di sekolah ada melakukan pembukuan secara rutin?	10	12	8	30
2	apakah Kualitas pembukuan keuangan dana BOS di sekolah sudah baik?	8	12	10	30
3	Apakah Bendahara sekolah ada menyampaikan	7	12	11	30

	pertanggungjawaban dengan baik?				
4	apakah masih ada keluhan dan pengaduan dari guru, komite, maupun orang tua?	20	10	-	30
5	apakah ada laporan pembelanjaan dalam menggunakan dana BOS di sekolah?	12	10	8	30
6	Apakah menurut Bapak/Ibu, Tim manajemen dana BOS Kabupaten/Kota pernah melakukan inspeksi langsung ke sekolah?	12	8	10	30
Jumlah		69	64	47	180
Rata-Rata		12	10	8	30
Persentase (%)		40%	33,33%	26,67%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator inspeksi langsung yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Dumai ke SDN 021 dan 022 Kota Dumai dapat dilihat bahwa sejumlah 12 orang atau 40% memberikan tanggapan sudah ada inspeksi langsung yang dilakukan terkait pembukuan pengeluaran dana BOS, pelaporan pembelanjaan oleh Bendahara sekolah dan adanya Tim Kabupaten yang juga turut melakukan inspeksi langsung ke sekolah-sekolah. Kemudian 10 responden lainnya memberikan tanggapan kadang-kadang atau sebesar 33,33%, hal ini disebabkan karena inspeksi langsung ke sekolah-sekolah tersebut hanya sesekali dilakukan atau kadang-kadang dilakukan, tidak ada penjadwalan khusus dari Dinas Pendidikan kapan inspeksi langsung ke sekolah-sekolah harus dilakukan terkait penggunaan dana BOS di sekolah. Sedangkan responden yang memberikan tanggapan tidak baik hanya sekitar 8 orang atau sebesar 26,67%, hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa inspeksi langsung yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan masih kurang efektif dalam melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah terkait penggunaan dana BOS.

Sehingga dari data tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa inspeksi langsung yang dilakukan masih kurang baik dalam pelaksanaannya karena berada pada skor 34 % - 66 %.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 15 Juni 2020 pukul 10.00 WIB dengan salah seorang staf Dinas Pendidikan Kota Dumai. Untuk melihat apakah sudah tepat waktu kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Dumai berikut kutipan wawancara penulis dengan KASI SD bidang pendidikan dasar:

“Di dalam tiap satu triwulan sekolah membuat laporan k7 dan k7A yang di isi secara online, di mana tugas kami adalah merekap laporan k7 dan k7A yang telah diterima menjadi k8 di akhir semester. Setelah itu dinas pendidikan kota Dumai menyerahkan laporan k8 ke dinas pendidikan provinsi untuk ditindak lanjuti. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh pengawas sekolah sekali dalam tiap satu semester yaitu memonitoring, menginstrusikan, dan memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan JUKNIS BOS dan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Dan setiap pengawas sekolah adalah mantan kepala sekolah.”(Wawancara dengan KASI SD Bidang Pendidikan Dasar, Ibu Linda, 15 Juni 2020)

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa proses pengawasan atau inspeksi langsung harusnya dilaksanakan setiap satu triwulan (3 bulan) sekali, yaitu sekolah di akhir triwulan mebuat laporan yang diberi nama k7 dan k7A.

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Pengawasan/inspeksi tepat waktu dimaksudkan untuk mengetahui waktu pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Dumai, apakah sudah sesuai dengan waktu petunjuk teknis (JUKNIS) BOS. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam JUKNIS BOS bahwa pengawasan berupa monitoring secara langsung ke setiap sekolah dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana. Di dalam melakukan

pengawasan secara langsung tim manajemen bos dituntut agar memanfaatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggung jawab.

Untuk melihat apakah sudah tepat waktu kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Dumai, Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap. Dalam melakukan pengawasan dana BOS aliran kerja anggota pengawasan harus mendapatkan informasi mengenai semua sekolah yang mendapatkan dana BOS secara keseluruhan dan pengumpulan informasi harus dilakukan dengan obyektif. Sehingga dapat melakukan pengawasan dengan baik dan sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Untuk mengetahui pengumpulan informasi pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan, penulis melakukan wawancara dengan Staf SD Bidang Pendidikan Dasar:

“Informasi yang menjadi dasar pengawasan didapat oleh kami setelah setiap triwulannya sekolah mengisi penggunaan dana BOS. Laporan tersebut berisi untuk apa saja dana BOS digunakan secara rinci. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Penggunaan dana dan disimpan sekolah juga untuk keperluan pengawas dan audit. Dana BOS tersebut harus sesuai dengan RKAS yang telah disusun oleh sekolah setiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang di dapat itu pengawas lapangan melakukan pengawasan di setiap 2 triwulan sekali memonitoring sekolah bahwa penggunaan dana BOS sesuai dengan yang telah dilaporkan dan RKAS yang dibuat. Untuk RKAS sekolah dapat mengevaluasi di semester 1”. (Wawancara dengan ibu Linda selaku staf SD, 15 Juni 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa informasi mengenai pengawasan didapat dari pelaporan yang diberikan sekolah secara online. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah dalam penggunaan dana BOS. Laporan tersebut juga disimpan oleh sekolah untuk keperluan pengawas yang turun langsung kelapangan. Dari hasil pelaporan mendapat informasi pengawasan yang akan dibawa ke sekolah memastikan bahwa penggunaannya sudah sesuai dengan yang telah dilaporkan secara online. contohnya Apabila penggunaan dana BOS itu

berupa barang-barang maka bukti kwitansi yang akan di cek oleh pengawas. Berdasarkan wawancara diatas juga dapat disimpulkan bahwa pelaporan penggunaan dana BOS yang diberikan secara online oleh sekolah, sudah memberikan informasi pengawasan secara keseluruhan.

Tabel.V.7. Hasil Observasi Terkait Inspeksi Langsung

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Bentuk kegiatan	Kegiatan melakukan wawancara.
2	Pengundang/Pelaksana kegiatan	Pengundang : Dinas pendidikan dan Orang tua murid Pelaksana : mahasiswa yang melakukan penelitian.
3	Waktu kegiatan	Senin,15 Juni 2020 Jam : 10.00 – 12.00
4	Tempat kegiatan	Ruangan Dinas Pendidikan bagian Pengawas sekolah dasar dan di Sekolah Dasar Negeri 021 dan 022 Kota Dumai.
5	Actor yang terlibat	2 orang staf Dinas Pendidikan bagian Pengawas Sekolah Dasar dan 30 orang tua murid.
6	Hasil observasi	Proses pengawasan atau inpeksi langsung harusnya dilakukan setiap satu triwulan (3 bulan) sekali, yaitu sekolah di akhir triwulan membuat laporan yang diberi nama K7 dan K7A. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Informasi pengawasan didapat dari pelaporan yang diberikan secara online, sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah dalam mengawasi penggunaan Dana BOS dan sekolah juga harus menyimpan laporan tersebut untuk keperluan pengawas yang turun secara langsung dilapangan. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden dapat disimpulkan bahwa inpeksi langsung dilakukan oleh Dinas Pendidikan masih kurang baik dalam pelaksanaannya.

3. Pelaporan

Peran dari Dinas Pendidikan dalam mengawasi penggunaan dana BOS selain melakukan pengamatan langsung ke sekolah-sekolah, melakukan inspeksi/pemeriksaan langsung, juga turut serta melakukan pelaporan. Disini Dinas Pendidikan berperan mengecek setiap pelaporan anggaran dana BOS,

apakah pelaporan itu dilakukan realistis, apakah laporan tersebut tepat waktu dan rutin dilakukan oleh sekolah-sekolah.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator pelaporan dapat dilihat hasil tanggapan responden berikut:

Tabel.V.8. Tanggapan Responden Terhadap indikator Pelaporan

No	Item Penilaian Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Ada	Kadang-kadang	Tidak Ada	
1	2	3	4	5	6
1	Apakah menurut Bapak/Ibu, pihak bendahara sekolah ada melakukan pelaporan kepada kepala sekolah dan komite sekolah tentang penggunaan dana BOS?	22	8	-	30
2	Apakah Kepala Sekolah mengawasi setiap pengeluaran yang dilakukan Bendahara Sekolah?	17	6	7	30
3	Apakah komite sekolah juga melakukan pengawasan terhadap pelaporan dana BOS?	18	10	2	30
4	Apakah bendahara sekolah sudah menyampaikan laporan sesuai ketentuan?	10	13	7	30
5	Apakah ada laporan/pengaduan yang menyatakan dana BOS selalu dikeluarkan terlambat dari jadwalnya?	18	12	-	30
6	Apakah menurut Bapak/Ibu, ada tim audit yang melakukan auditing terhadap laporan pengelolaan dana BOS disekolah?	12	10	8	30
Jumlah		97	59	17	180
Rata-Rata		17	10	3	30
Persentase (%)		56,67%	33,33%	10%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator pelaporan, sebagai salah satu peran Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam

mengawasi penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri 021 dan 022 Kota Dumai dapat dilihat bahwa sejumlah 17 orang atau 56,67% memberikan tanggapan baik karena menurut mereka ada pelaporan yang telah dilaporkan oleh bendahara sekolah mengenai penggunaan dana BOS dan pelaporan sekolah tersebut sudah sesuai dengan Juknis Dana BOS.

Kemudian 10 responden lainnya atau sebesar 33,33% memberikan tanggapan kadang-kadang disebabkan pelaporan yang dilakukan oleh bendahara sekolah dinilai belum efektif karena tidak berkala atau hanya dilakukan kada-kadang oleh Bendahara Sekolah terkait penggunaan dana BOS..

Sedangkan responden yang memberikan tanggapan tidak ada hanya sekitar 3 orang atau sebesar 10% Sehingga dari data tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan kota Dumai masih kurang baik karena item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34 % - 66 %.

Tabel.V.9. Hasil Observasi Terkait Pelaporan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Bentuk kegiatan	Kegiatan melakukan wawancara
2	Pengundang/Pelaksana kegiatan	Pengundang : Dinas pendidikan dan Orang tua murid Pelaksana : mahasiswa yang melakukan penelitian
3	Waktu kegiatan	Senin,15 Juni 2020 Jam : 10.00 – 12.00
4	Tempat kegiatan	Ruangan Pengawas sekolah dan di Sekolah Dasar Negeri 021 dan 022 Kota Dumai
5	Actor yang terlibat	2 orang staf Dinas Pendidikan bagian Pengawas Sekolah Dasar dan 30 orang tua murid
6	Hasil observasi	Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator pelaporan, sebagai salah satu peran Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam mengawasi penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar dan para responden memberikan tanggapan baik karena menurut mereka ada pelaporan yang telah dilaporkan oleh bendahara sekolah mengenai penggunaan Dana BOS dan

		pelaporan sekolah tersebut sudah sesuai dengan Juknis Dana BOS. Dalam penggunaan Dana BOS disekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama Tim Manajemen BOS sekolah, Dewan Sekolah dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang ditandatangani oleh peserta rapat.
--	--	---

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan fatal. Dalam penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan.

Di dalam Juknis BOS telah dijelaskan apa saja komponen kegiatan-kegiatan yang dapat menggunakan dana BOS. Dinas Pendidikan Kota Dumai selaku pengawas bertugas memonitoring dan memastikan bahwa sekolah menggunakan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Juknis BOS.

Untuk mengetahui pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai, berikut hasil wawancara dengan pengawas sekolah yang berada di UPTD Pendidikan:

“Pada dasarnya tugas kami sebagai pengawas yang turun langsung kelapangan adalah memastikan bahwa penggunaan dana Bos telah sesuai dengan Juknis BOS dan RKAS yang telah dibuat. Yang sering kami temukan adalah penggunaan dana harian, seperti contohnya dana harian untuk uang makan telah dikeluarkan tiba-tiba ada rapat mendadak, sekolah mengeluarkan biaya lagi untuk rapat menggunakan dana BOS, ya itu merupakan penyimpangan, tapi rapat itu kan tidak

setiap hari terkadang hanya beberapa bulan sekali. Selama ini untuk penyimpangan yang fatal kami belum menemukan”. (Wawancara dengan pengawas sekolah di UPTD Pendidikan, 15 Juni 2020)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui pengawasan secara langsung ke sekolah hanya dilakukan berdasarkan Juknis BOS secara keseluruhan. Apakah alokasi pembiayaan sudah sesuai dengan RKAS yang telah dibuat oleh sekolah. Pengawasan tidak menentukan atau memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi.

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Berkenaan dengan pengawasan dana BOS, biaya pengawasan yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan dan undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas. Biaya diperlukan untuk mendukung kegiatan pengawasan, terutama pengawasan yang dilakukan secara langsung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kejelasan pengurusan administrasi lembaga pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik birokrasi yang berbelit-belit menyebabkan indikasi adanya praktek Korupsi dalam sistem administrasi. Di mana sudah tertanam dalam sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa berurusan dengan administrasi tentu membutuhkan biaya agar dapat cepat terselesaikan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur dengan jelas mengenai masalah administrasi, sehingga masyarakat umum bisa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing antara lembaga pemerintahan dan masyarakat. Untuk itu penulis ingin mengetahui terkait aturan yang ada dalam biaya pengawasan dana BOS, berikut wawancara penulis dengan KASI SD Bidang Pendidikan Dasar:

“Dalam melaksanakan pengawasan secara langsung pengawas sekolah mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai. Setelah SPT keluar pengawas mendapatkan biaya operasional untuk melakukan pengawasan, besaran biaya yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dalam Kota, yaitu perjalanan dinas dalam kota kurang lebih seratus ribu rupiah dan anggaran itu diusulkan tiap tahun. Untuk jumlah pengawas SD Negeri dan swasta yang ada di Kota Dumai berjumlah 25 orang sekali monitoring, satu tahun ada 2 kali monitoring jadi jumlah pengawas ada 50 orang untuk SD saja. Menurut kami itu sudah wajar karena dalam satu kali pengawasan, satu orang pengawas bertugas memonitoring 4 sampai 5 sekolah, kalo seandainya dibagi saja satu hari merka melakukan pengawasan satu sekolah maka untuk satu hari mereka mengeluarkan kurang lebih dua puluh lima ribu rupiah. (Wawancara dengan KASI SD Bidang Pendidikan Dasar, 15 Juni 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan dana BOS secara langsung. Biaya dalam melaksanakan pengawasan diatur sesuai dengan PERDA dalam Kota mengenai perjalanan dinas dalam kota, biaya pengawasan diberikan setelah Kepala Dinas mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT), dan diusulkan setiap tahun. Menurut keterangan hasil wawancara di atas juga diketahui bahwa besarnya dana pengawasan kurang lebih seratus ribu rupiah, setiap satu orang pengawas bertugas memonitoring 4 sampai 5 sekolah. Jika dalam satu hari pengawas memonitoring 1 sekolah maka kurang lebih biaya pengawasan yang di dapat dua puluh lima ribu rupiah.

Mengacu pada hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai sudah realistis secara ekonomis, mengingat biaya untuk makan dan transportasi pengawas sebesar dua puluh lima ribu rupiah tidak berlebihan sesuai kondisi yang ada di Kota Dumai.

Selain itu, Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada

seluruh organisasi yang memerlukannya. Pengawasan dana BOS yang dilakukan oleh Dinas pendidikan terdiri dari pengawasan yang dilakukan secara langsung, yaitu pengawas turun langsung ke lapangan untuk memastikan penggunaan dana BOS oleh sekolah telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Juknis BOS. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan berupa pelaporan rekapitulasi penggunaan dan BOS secara online oleh sekolah.

Dinas Pendidikan memiliki berbagai macam bidang di dalamnya dan tidak semua terkait dengan fungsi pengawasan dana BOS, agar mengetahui lebih jelas dan detail bidang apa yang terkait pengawasan dana BOS yang ada di Dinas pendidikan serta siapa saja yang memerlukan informasi terkait pengawasan dana BOS. Berikut wawancara penulis dengan staf KASI SD:

”Di sini ada 2 unit pendataan SD dan SMP tugas saya adalah mendata tingkat sekolah dasar, data itu terkait dengan jumlah SD penerima dana BOS dan jumlah siswa/i yang ada di setiap sekolah. Data itu semua saya dapat setelah sekolah mengisi data pokok pendidikan (DAPODIK) secara online ke dalam web yang telah disediakan Oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu tugas saya adalah memastikan sekolah telah memasukan data penggunaan dana BOS setiap triwulannya. Informasi data yang telah saya dapat diberikan kepada KASI SD, Data ini lah yang menjadi informasi dalam pengawasan yang dilakukan secara langsung”.(Wawancara dengan Staf KASI SD, 15 Juni 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas informasi pertama kali di dapat oleh unit pendataan SD yaitu mengenai jumlah sekolah, jumlah siswa di setiap sekolah dan penggunaan dana BOS setiap triwulannya yang dilaporkan secara online. Pelaporan data yang dilakukan sekolah merupakan bagian dari pengawasan dana BOS yang dilakukan secara tidak langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai. Informasi yang telah di dapat oleh tim pendataan SD diberikan kepada KASI SD, sebagai dasar melakukan pengawasan secara langsung/lapangan.

Berdasarkan hasil tanggapan yang diberikan responden pada indikator pengamatan di lapangan, inspeksi langsung dan pelaporan, maka data tersebut dapat digabungkan kedalam tabel rekapitulasi untuk mengetahui lebih jelas mengenai peran Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam mengawasi penggunaan dana BOS di SDN 021 dan 022 Kota Dumai, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V. 7 berikut ini:

Tabel V.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Implementasi Peran Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam mengawasi penggunaan dana BOS di SDN 021 dan 022 Kota Dumai

No	Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Ada	Kadang-kadang	Tidak Ada	
1	Pengamatan di lapangan	12	10	8	30
2	Inspeksi langsung	12	10	8	30
3	Pelaporan	17	10	3	30
Jumlah		41	30	19	90
Rata-Rata		14	10	6	30
Persentase (%)		46,67%	33,33%	20 %	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, terlihat bahwa secara keseluruhan peranan Dinas Pendidikan Kota Dumai sudah cukup baik dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah SDN 021 dan 022 Kota Dumai. Hal ini terlihat dari 14 orang atau sebesar 46,67% menyatakan bahwa secara keseluruhan indikator peranan Dinas Pendidikan Kota Dumai sudah cukup baik dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah SDN 021 dan 022 Kota Dumai.

B. Hambatan-hambatan Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam Mengawasi Penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri 021 dan 022 Kota Dumai

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan terkait penggunaan dana BOS yakni :

1. Faktor sumber daya manusia, jumlah tim pengawas lapangan tidak sebanding dengan jumlah sekolah SD yang ada di Kota Dumai. Jumlah pengawas SD hanya 50 orang sedangkan menurut data jumlah SD di Kota Dumai ada 279 sekolah. Walaupun sudah diberi waktu yang cukup untuk pengawas, hal ini masih dirasa kurang baik mengingat tugas pengawas tidak hanya dalam urusan pengawasan dana BOS.
2. Faktor pemberian sanksi, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan tertulis. Dalam contoh kasus tertentu Dinas Pendidikan belum bisa mengatasi masalah pelanggaran dengan baik, karena masih merasa bahwa pelanggaran yang terjadi tidak bisa dihindari.
3. Faktor ketegasan pimpinan, dalam hal ini Kepala Sekolah. Hendaknya kepala Sekolah lebih mengawasi penggunaan dana BOS dan melakukan pelaporan yang rutin kepada Dinas Pendidikan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam mengawasi penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar Kecamatan Dumai Timur (Sekolah Dasar Negeri 021 dan 022 Kota Dumai), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tabel rekapitulasi, terlihat bahwa secara keseluruhan peranan Dinas Pendidikan Kota Dumai sudah cukup baik dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah SDN 021 dan 022 Kota Dumai. Hal ini terlihat 46,67% responden menyatakan bahwa secara keseluruhan indikator peranan Dinas Pendidikan Kota Dumai sudah cukup baik dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah SDN 021 dan 022 Kota Dumai.
2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengawasan dana BOS di sekolah-sekolah khususnya kota Dumai yaitu Faktor sumber daya manusia, jumlah tim pengawas lapangan tidak sebanding dengan jumlah sekolah SD yang ada di Kota Dumai. serta Faktor pemberian sanksi, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan tertulis. Dalam contoh kasus tertentu Dinas Pendidikan belum bisa mengatasi masalah pelanggaran dengan baik, karena masih merasa bahwa pelanggaran yang terjadi tidak bisa dihindari.

B. Saran

1. Hendaknya ada penambahan jumlah pengawas untuk daerah Kota Dumai agar tidak terjadi ketimpangan jumlah pegawai dan sekolah sehingga pengawasan dapat lebih efektif dilakukan.
2. Pada penelitian lanjutan hendaknya dikaji indikator lain yang dapat mengukur peranan Dinas Pendidikan dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah Dasar.



DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M. 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abdul Wahab, Solichin, 2001. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Administrasi dan Management Umum*. Ghalia Indonesia, Jakarta 1982
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Perdana Media Grup: Jakarta.
- Dunn, N Wiliam. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Dye, R, Thomas. 1972. *Understanding Publick Policy*. Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs: New Jersey.
- Ham, C.,and Hill, M. 1993. *The Policy Process in Modern Capitalist State*, Harveset Wheatsheaf: New York.
- Hoogwood, dan Gunn. 1984. *Policy Analisis For the Real World*. Oxford University Press: London.
- Hoogerwerf, A. *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 1978)
- Islami, M Irfan. 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksaara: Jakarta.
- Kuncoro, Mudjarad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang)*. Erlangga: Jakarta
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rja Grafindo: Jakarta

- Maleong, J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mazmanian, A.D, dan Sabatier, A.P. 1983. *Implementation and Public Policy*. Scott, Foreman and Company: Illinois.
- Mile, M. B. DAN Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rihidi. UI Press: Jakarta.
- Moehir.HAS, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Penerbit LAN RI Jakarta 1996
- Nitisemito, Alex S., 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengantar*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Nraha, Taliziduhu. 2006. *Kybernologi: sebuah scientific enterprise*. Sirao Crenditia: Tangerang.
- Nugroho, Rian. 2008. *Public Policy*. Elex Media Kopetindo: Jakarta.
- Putra, Fdilah. 2001. *Paradigma Krisis dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Soehartono, Irawan, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2007
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refieka Aditama: Jakarta
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik-Konsep, Teopri dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Surachmad, Winarno. 1987. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito: Bandung.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik-teori dan Proses*. Media Presindo:
Jakarta.

Dokumentasi:

*Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, 2013. Pekanbaru, Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الرياوي

Kampus : Jalan Pekanbaru - Pekanbaru No. 113, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28134
Telp. +6270 1974-074 Fax. +6270 1974034 Email: info@iur.ac.id www.iur.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 4476 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

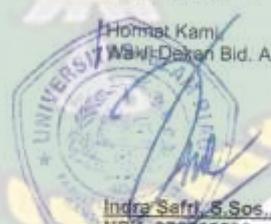
Nama : Delfika
NPM : 137310131
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pendidikan dalam Mengawasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai
Persentase Plagiasi : 24%
Jumlah Halaman : 88 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Tumitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 08 Desember 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik


Indra Safti, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230